

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Salim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintahan Daerah (Kajian Politik dan hukum)*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Amir Syarifudin, 1984, *Pelaksanaan hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Hukum Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Jayadi Setiabudi, 2006, *Panduan Lengkap Mengurus Tanah Rumah Serta Segala Perizinannya*, Buku Pintar. Yogyakarta.
- Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang Kabau (LKAAM) Sumatera Barat, 2000, *Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minang Kabau*, Padang.
- Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saleh Adiwinata, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Binacipta, Jakarta.
- Sarjita, 2005, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Edisi Kedua, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sunaryati Hartono, 1999, *Pengaturan Hak Ulayat dalam UUPA Yang Baru*. Yayasan Pengembang Hukum Bisnis, Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Suyud Margono, 2004, *ADR (Alternative Dispute Resoluttion) & Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yulia Mirwati, 2015, *Konflik Tanah Ulayat*, Andalas University Press, Kampus Unand Limau Manis, Padang.

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

C. Jurnal dan Website

Velly Farhana Azra,*et.al*, *Kewenangan kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Berdasarkan Perda Tanah Ulayat No.6 tahun 2008*, Diponegoro Law Jurnal, Vol.6 No.2 Tahun 2017.

<http://www.dalyeni.multiply.com>, diakses pada tanggal 08 September 2019.